



PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENDAPATAN  
SEKRETARIAT

	NOMOR SOP	: SOP/XIX.A.c.7/DISPENDA/2014
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 Maret 2014
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 31 Oktober 2014
	DISAHKAN OLEH	: <b>SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN PROVSU</b>  <b>HALINA, SH</b> <b>PEMBINA TK. I</b> <b>NIP. 19581225 198503 2 004</b>
NAMA SOP	: <b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li><li>3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;</li><li>4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 pada DIKTUM KETIGA tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;</li><li>5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</li><li>8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;</li><li>10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan</li><li>2. Mengetahui tupoksi masing-masing bidang pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara</li><li>3. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer/ notebook</li><li>4. Memiliki kemampuan analisis kegiatan sesuai dengan IKU yang telah dirumuskan</li><li>5. Memiliki kemampuan interpersonal untuk mengkomunikasikan isi LAKIP</li></ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penyusunan RENSTRA</li><li>2. SOP Penyusunan IKU</li><li>3. SOP Penyusunan RENJA</li><li>4. SOP Pelaporan Laporan Triwulan</li><li>5. SOP Penanganan Surat Masuk</li><li>6. SOP Penerbitan Surat Keluar</li><li>7. SOP Penyusunan DPA</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen RENSTRA, IKU, RENJA dan Laporan Triwulan</li><li>2. Komputer, Printer, Jaringan Internet</li><li>3. Dokumen Laporan Kegiatan Masing-Masing Bidang dan UPT Dinas Pendapatan Provsu</li><li>4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)</li></ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Jika SOP Penyusunan LAKIP tidak dibuat maka Akuntabilitas Kinerja SKPD tidak dapat di ukur	Disimpan dalam bentuk Soft copy dan hard copy	